

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat 1 mengatur mengenai perekonomian Indonesia yang disusun atas usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan pasal 33 antara lain kemakmuran masyarakat diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Kemakmuran adalah salah satu tujuan dari suatu bangsa. Pemerintah mencanangkan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Namun walaupun pemerintah sudah mencanangkan berbagai program untuk pengentasan kemiskinan, masalah kemiskinan di negeri ini juga belum terselesaikan. Dewasa ini kemiskinan di Indonesia meningkat.

Kemiskinan adalah permasalahan setiap bangsa. Berkaitan dengan kemiskinan bangsa Indonesia telah mencantumkan dalam Undang-Undang Negara. Isi pasal tersebut menyebutkan jaminan Negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar (UUD 1945 pasal 34). Dari pasal ini lah dasar-dasar program pengentasan kemiskinan dicanangkan. Walaupun demikian kondisi dilapangan menunjukkan hasil yang berbeda. Dari data Badan Pusat Statistik (2003) menunjukkan bahwa krisis ekonomi berdampak pada kenaikan jumlah

penduduk miskin 38,39 juta dan 16,5 juta atau sekitar 43% dari penduduk miskin adalah fakir miskin.

Krisis ekonomi, selain dampak kemiskinan ternyata memberikan pelajaran lain kepada para pakar ekonomi. Sebagaimana Data Menteri Negara Koperasi setelah krisis ekonomi (2004) menunjukkan 42,452 juta usaha, ternyata 41,8 juta atau sekitar 98,5% adalah usaha mikro, hanya sekitar 650 ribu yang termasuk dalam usaha kecil dan menengah, dan sekitar dua ribu lainnya adalah usaha besar. Hal tersebut membuktikan bahwa usaha mikro berjasa dalam menyelamatkan perekonomian saat terjadi krisis serta mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Negara ini.

Lembaga keuangan dewasa ini menjadi instrument yang penting dalam sistem ekonomi dunia. Bunga telah menjadi kewajaran bahkan menjadi ciri khas perekonomian modern. Bunga telah menjadi suatu daya tarik untuk dinikmati, dimanfaatkan, dalam proses pengaturan keuangan dan kegiatan bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga perantara didesain sedemikian rupa untuk mengolah bunga agar merangsang investasi. Fenomena ini menjadi ciri dan alat dari kegiatan bisnis dan keuangan dalam rangka menggiatkan perdagangan, industri, dan aktivitas ekonomi lainnya diseluruh dunia.

Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat islam diharapkan memunculkan lembaga keuangan yang islami, yaitu mengembangkan lembaga keuangan syariah secara lebih baik. Pada dasarnya lembaga

keuangan syariah merupakan sistem yang sesuai dengan ajaran agama islam yang bebas dari riba dan gharar.

Gagasan ekonomi islam merupakan alternatif terhadap ekonomi kapitalis dan sosialis yang bukan saja tidak sejalan dengan ajaran agama islam, tetapi juga gagal memecahkan permasalahan ekonomi untuk dunia ketiga. Sistem ekonomi islam diharapkan mampu mencegah ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber materi agar dapat memberikan kepuasan pada semua manusia dan memungkinkan mereka menjalankan kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat. Hal tersebut memunculkan lembaga keuangan syariah yang bebas bunga (*interest free*), koperasi syariah, dan sebagainya yang dikaitkan dengan syariah islam tidak pelak lagi mengundang respon dan keragu-raguan. Tatanan sistem kelembagaan di lembaga keuangan di Indonesia mengalami perubahan yang mendasar. Hasil perubahan tatanan sistem lembaga keuangan dengan menggunakan syariah disebut dengan kospin syariah. Kospin syariah adalah lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada laba (*profit*). Dalam mencapai laba, lembaga keuangan syariah harus menentukan strategi. Strategi yang disusun dengan penguasaan pasar dan mengandalkan jenis produk yang ditawarkan oleh bank syariah.

Perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah dalam satu dasawarsa belakangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah,

obligasi syariah, pegadaian syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Perkembangan perbankan menurut data Bank Indonesia mengalami kemajuan yang spektakuler. Jika sebelum tahun 1999, jumlah bank syariah sangat terbatas di mana hanya ada sebuah bank syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia dengan beberapa kantor cabang, kini ada 21 bank syariah dengan jumlah pelayanan kantor bank syariah sebanyak 611 (data Mei 2006). Lembaga asuransi syariah juga mengalami perkembangan yang cukup pesat di Indonesia, dan merupakan yang paling cepat di dunia. Indonesia satu-satunya negara yang memiliki 34 lembaga asuransi syariah, sedangkan Malaysia hanya terdapat 4 lembaga asuransi syariah. Dan hanya Indonesia yang memiliki 3 lembaga reasuransi syariah. Di negara manapun biasanya hanya ada satu lembaga reasuransi syariah. Jumlah BPRS dan BMT juga telah melebihi dari 3.800 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Seiring dengan pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, secara otomatis lembaga ini juga ikut andil juga dalam membangun perekonomian di Indonesia. Seperti halnya lembaga keuangan konvensional yang lebih dahulu berkembang di Negara ini.

UKM atau Usaha kecil dan menengah adalah penolong negeri ini ketika negeri ini mengalami krisis ekonomi. UKM memiliki hubungan yang erat dengan pembiayaan yang ditawarkan oleh BPR/S, karena UKM pada umumnya mendapatkan dana dari BPR/S. Lembaga keuangan syariah memiliki posisi yang penting dalam mengembangkan UKM. Sektor usaha

UKM pada umumnya berada disektor tradisional dengan perkiraan resiko yang tidak lazim tersedia pada perbankan konvensional. Sistem bagi hasil yang ditawarkan bank syariah menghindari prinsip mendapatkan untung atas kerjasama orang lain. Maka sangatlah tepat jika format pengembangan lembaga keuangan syariah diarahkan untuk pengembangan UKM. Lembaga keuangan syariah disini adalah bank syariah, BPRS dan BMT

Kontribusi lembaga keuangan syariah dalam membantu perekonomian dapat dilihat dari aktivitasnya dalam penyaluran dana. Misalnya seberapa besar dana yang diberikan oleh BPRS untuk membantu kebutuhan masyarakat, porsi pembiayaan konsumtif dan produktif, dan total NPF dan ROI BPRS. Dari data-data aktivitas BPRS itu, akan diketahui seberapa besar peran BPRS ini terhadap perekonomian.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN PERAN BPRS TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang diajukan dalam permasalahan penelitian adalah:

- 1 Seberapa besar BPRS memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat dilihat dari jumlah total pembiayaan baik secara rupiah maupun unit yang disalurkan BPRS?

- 2 Seberapa besar BPRS memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat dilihat dari porsi pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif?
- 3 Seberapa besar BPRS memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat dalam jangka panjang?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian agar pembahasan lebih terarah.

Batasan-batasan yang diambil penulis sebagai berikut :

1. Manfaat BPRS secara ekonomi terhadap masyarakat dilihat dari jumlah total pembiayaan, porsi pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif dan total NPF dan ROI BPRS.
2. Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Keuangan Syariah yaitu BPRS Barokah Dana Sejahtera, BPRS Dana Hidayatullah dan BPRS Madina.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari studi ini adalah

1. Mengetahui tingkat peran BPRS terhadap perekonomian masyarakat dilihat dari rasio jumlah pembiayaan dengan total aset.
2. Mengetahui jumlah unit pembiayaan dan rata-rata pembiayaan per unit yang disalurkan BPRS.

3. Mengetahui proporsi pembiayaan produktif dan konsumtif BPRS.
4. Mengetahui kemampuan BPRS dalam memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat untuk jangka panjang.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta mengembangkan antara teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan kenyataan dilapangan.

2. Bagi praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktisi, terutama yang berkenaan dengan strategi pengelolaan pembiayaan.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan wawasan yang berkenaan dengan materi penelitian.